



Manusia Indonesia dan Keterpenjaraannya: Meretorik Ulang Wacana Indonesia

**Oleh
Dr. Yoseph Yapi Taum, M.Hum.**

**Seminar Lustrum IV
“Meretorik Ulang Indonesia”
Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta, 29 Mei 2013**

MANUSIA INDONESIA DAN KETERPENJARAANNYA: Meretorik Ulang Wacana Indonesia

Oleh Yoseph Yapi Taum¹

*In general way, I think that intellectuals –if this category exist, which is not certain even desirable—are abandoning their old prophetic function.
--Michel Foucault "Power and Sex"*

Intisari

“Meretorik Ulang Indonesia” merupakan sebuah tema yang penting dan mendesak untuk dibicarakan secara terbuka. Sejak Indonesia digagas, berdiri, sampai sekarang ini, sudah banyak orang yang meretorik wacana Indonesia. Akan tetapi, sejak tumbangnya rezim otoriter Orde Baru, Indonesia mengalami involusi yang jika tidak diretorik ulang, akan menghadapi persoalan internal yang serius karena tampak bahwa Indonesia tidak pernah belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu.

Makalah ini berbicara tentang (berbagai proses) pembentukan visi bersama tentang sebuah rumah yang dibayangkan sebagai Indonesia.² Dengan ‘komunitas yang dibayangkan’, teori-teori konstruksi sosial tidak hendak menyatakan bahwa sebuah negara merupakan ilusi atau rekayasa sosial politik belaka, melainkan bahwa proses membangun kebersamaan merupakan sebuah proses yang berlangsung tanpa akhir. Proses pembentukan visi bersama ini berlangsung sejak rumah Indonesia ini didirikan sampai sekarang. Dalam pembentukan visi bersama itu, dapat dipersoalkan modus kehidupan yang otentik dan yang tidak otentik –meminjam konsep-konsep berpikir Heidegger. Makalah ini bertujuan memahami kebermaknaan hidup manusia Indonesia dan menemukan makna eksistensial wacana Indonesia. Untuk itu, makalah ini secara berturut-turut akan membahas (1) Keterpenjaraan: Perspektif Heidegger; (2) Keterpenjaraan Manusia Indonesia; (3) Beberapa Imajinasi tentang Indonesia: Pengalaman Orde Lama; (4) Sosok Leviathan Negara Orde Baru; (5) Leviathan Moral dalam Orde Reformasi; dan akan diakhiri dengan (6) Penutup: Membuka Ruang Multikultural.

1. Keterpenjaraan: Perspektif Heidegger

Pada prinsipnya, terdapat dua pandangan yang saling bertentangan dalam membicarakan “subjek” (sebuah konsep abstrak tentang relasi manusia dengan dunianya), seperti subjek tentang makna, jati diri, identitas Indonesia ini. *Pertama*, kelompok yang menolak subjek. Mereka berpandangan bahwa tidak ada lagi subjek, karena subjek larut dalam berbagai struktur di luar dirinya (bahasa, diskursus, atau citra), yang menggiring pada kematian subjek. Para pemikir yang merayakan kematian subjek adalah Derrida, Foucault, Lacan, Deleuza & Guattari, Baudrillard, dan Rotry. *Kedua*, kelompok yang mengakui kehadiran subjek yang tidak mutlak namun subjek

¹ Makalah dibawakan dalam Seminar Lustrum IV Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dengan tema “Meretorik Ulang Indonesia”, tanggal 29 Mei 2013.

² Lihat Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, Verson, 1991.

plural dalam bingkai intersubjektivitas. Pemikir yang mengusung pandangan ini antara lain Heidegger, Gadamer, Ricoeur, Kristeva, Bakhtin, Giddens, dan Bourdieu (Piliang, 2006: 2-7).

Martin Heidegger (1889-1976), seorang filsuf Jerman yang dipandang sebagai pemikir paling berpengaruh di abad ke-20, memaparkan *verstehen*-nya tentang manusia dalam buku *Being and Time*. Manusia (*Dasein*)³ pada prinsipnya mengalami keterpenjaraan atau keterlemparan dalam hidupnya. Seperti bayi yang dilahirkan “terlempar” keluar dari rahim ibunya, keberadaan *Dasein* di dunia ini adalah suatu faktisitas niscaya yang tak mempunyai alasan (Hardiman, 2008: 70). Sekalipun terdapat fakta bahwa ia ada, demikian Heidegger, pertanyaan tentang dari mana dan ke mana manusia tetap tak jelas.

Ilustrasi tentang keterpenjaraan dan keterlemparan itu jelas terlihat, misalnya dalam menghadapi kematian. Heidegger menilai kematian adalah sebuah momen paling otentik dan eksistensial bagi *Dasein*. Kita tak pernah menjadwalkan kapan lahir, maka kita pun tak pernah mengetahui kapan dan bagaimana kematian itu datang. Akan tetapi, kematian sesungguhnya sudah menyongsong *Dasein* sejak keterlemparannya. Manusia adalah ada-menuju-kematian (*Sein-zum-Tode*), karena kematian menyongsong sejak awal sampai akhir, kematian juga merentang dalam keseharian kita. Sekalipun demikian, kebermaknaan dan otentisitas hidup justru diperoleh di situ, yaitu di dalam ketidakpastian masa depan. Kematian bukan sesuatu yang bisa menjadi bagian dari pengalaman karena tidak ada yang pernah mengalami kematian dan menceritakannya kepada kita. Yang penting bukan kematian (*death*) itu sendiri tetapi perjalanan menuju kematian (*dying*). Esensi dari keberadaan hidup manusia adalah perjalanan menuju kematian.

Dengan ketidakpastian, orang memiliki harapan. Harapan berarti terbukanya kemungkinan. Adanya kemungkinan membuat orang termotivasi untuk hidup. Di situlah orang dapat menatap ke depan dan terus memperbaiki diri sepanjang hidupnya. Kita terus meng-‘ada’ sepanjang hidup dikandung badan. *Dasein* memiliki peluang untuk terus memaknai perjalanan hidupnya menuju kematian yang pasti meskipun tidak dapat dipastikan waktu kedatangannya.

Heidegger menegaskan bahwa kita tidak bisa lagi keluar dari “keterlemparan” tersebut. Ketika mencoba untuk keluar dari “keterlemparan”, manusia menjadi “tidak otentik.” Ia pada akhirnya pasti akan kembali kepada keterpenjaraan atau keterlemparan awalnya. *Dasein* menemukan otentisitasnya jika membuka diri terhadap ‘Ada’-nya dengan menghadapi kemungkinan-kemungkinan dalam hidupnya secara kreatif. *Dasein* menjadi tidak otentik ketika membiarkan dirinya larut dalam arus keseharian. Yang bisa kita lakukan adalah hidup dalam “keterlemparan” dengan kesadaran sebagai sumber makna. Kesadaran menciptakan dan memproyeksikan makna keluar dari dirinya dengan cara yang kreatif terhadap realitas sekeliling.

Manusia sebagai eksistensi yang menjadi sumber makna. Lebih jauh, argumen ini akan berimplikasi pada pengandaian bahwa hanya eksistensi manusia dalam rangkaian dialog dengan yang lain (*das Andere*) sebagai sumber makna. Dalam proses interpretasi terhadap dunia, subjek membuka dirinya terhadap berbagai kemungkinan dunia yang disediakan. Subjek yang demikian, menurut Heidegger, adalah subjek yang mempunyai kapasitas menafsir (subjektivitas) tetapi sekaligus terbuka terhadap dunia yang ditafsirkannya dalam rangka menemukan makna eksistensi (manusia) yang lebih dalam. Inilah subjek yang aktif dalam menafsir dunia tetapi

³ *Dasein* adalah kata Jerman yang berarti ‘Ada-di-sana’. Ada di mana? ‘Di-sana,’ di dalam dunia begitu saja, tanpa tahu dari mana dan mau ke mana. Itulah yang disebut faktisitas (*Faktizität*), yaitu kenyataan bahwa kita ada di dunia ini bersifat niscaya. Kita tak pernah ditanya lebih dahulu mau atau tidak hidup di dunia ini. Kita ‘ada-begitu-saja’, kita ‘di-sana’, di dalam dunia. Heidegger menyebut ini sebagai ‘keterlemparan’ (*Geworfenheit*). *Dasein* terlempar ke dunia ini. Dalam magnum opus *Being and Time*, Heidegger mengganti kata manusia dengan *Dasein*.

terbuka terhadapnya (Piliang, 2006: 7-8). Subjek baru ini adalah subjek yang tidak hanyut begitu saja pada dunia umum bentukan sosial, politik, sains, atau teknologi, tetapi selalu berupaya menafsirkannya untuk menemukan makna eksistensial yang paling dalam.

Meminjam pandangan Heidegger, kita sebagai individu maupun sebagai kelompok pun mengalami keterpenjaraan atau keterlemparan di dalam sebuah lingkungan yang kemudian diberi nama Indonesia. Kita 'ada-begitu-saja', terlempar, terpenjara dalam alam dan dunia Indonesia ini dengan berbagai ketakutan (*Furcht*) dan kecemasan (*Angst*) nyata.⁴ Yang membedakan *Dasein* dari mengada-mengada lain, adalah bahwa *Dasein* menyadari keterlemparan ini dan berupaya memahaminya untuk mencapai kebermaknaan hidup. Kesadaran akan keterlemparan membuat konsep tentang identitas Indonesia merupakan pemosisian diri yang terus-menerus berlangsung. Stuart Hall (Budianta, 2012: 256-257) membahas dua jenis proyek identitas, yaitu proyek untuk membangun entitas yang menyatukan kembali berbagai kelompok sosial (etnis/ras, negara-bangsa), dan proyek identitas yang menekankan keragaman dan pluralitas posisi. Dengan keterpenjaraannya seperti sekarang ini, modus kehidupan yang otentik dalam rumah yang dibayangkan sebagai Indonesia adalah membangun identitas yang menekankan keragaman dan pluralitas posisi.

2. Keterpenjaraan Manusia Indonesia

Indonesia berdiri menjadi sebuah negara pada 17 Agustus 1945 setelah merdeka dari penjajahan Belanda. Ruang-ruang dalam rumah bersama yang disebut Indonesia ini tercipta sebagai sebuah "kecelakaan sejarah" karena terbentuk berkat penjajahan kolonial Belanda. Nama resmi negara ini adalah Republik Indonesia. Sekalipun ibukota Indonesia saat ini adalah Jakarta, dalam sejarah, ibukota Indonesia pernah pindah ke Yogyakarta (4 Januari 1946 - 27 Desember 1949) dan Bukit Tinggi (1948-1949). Bahasa resmi negara adalah Bahasa Indonesia. Ideologi negara adalah Pancasila (*panca* artinya lima dan *sila* adalah dasar). Jadi, Pancasila adalah lima dasar yang menjadi ciri utama negara Republik Indonesia. Indonesia terletak dalam kawasan cincin api pasifik (*Ring of Fire*), sebuah kawasan yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi. Bendera negara Indonesia terdiri atas dua warna merah dan putih. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian.

Indonesia berasal dari kata dalam bahasa Yunani *indo* yang berarti 'India', dan *nesos* yang berarti 'kepulauan'. Jadi, Indonesia berarti 'kepulauan India'. Nama Indonesia diperkenalkan pertama kali oleh ahli etnologi Inggris, G.R. Logan, pada 1850. Selain nama resmi *Indonesia*, juga sering dipakai nama lain seperti *nusantara*. Nama ini berasal dari kata dalam bahasa Sansekerta *nusa* 'pulau' dan *antara* 'berkaitan'. Jadi, *nusantara* berarti 'pulau-pulau yang saling berkaitan' (lihat Taum, 2006).

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan panjang 5.120 km. Total wilayah Indonesia adalah 1.919.440 km². Sampai tahun 2001, pulau-pulau Indonesia berjumlah 18.110. Namun, hanya ada lima pulau besar yang menjadi pulau utama, yakni Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ibukota Indonesia, Jakarta, berada di Pulau Jawa. Meskipun tidak besar, Pulau Bali justru lebih terkenal di dunia daripada pulau-pulau lainnya di Indonesia.

Penduduk Indonesia saat ini berjumlah 234.893.453 orang dan tersebar di 17.500 pulau (Taum, 2006). Indonesia merupakan salah satu di antara sedikit negara di dunia yang memiliki karakteristik sebagai negara multi-etnik. Di Indonesia terdapat sekitar 931 etnik dengan 731

⁴ Menurut Heidegger, rasa cemas (*Angst*) adalah rasa yang asasi, dasarnya, dan menjadi kunci memahami keberadaan kita yang terdalam. Kecemasan bukan ketakutan (*Furcht*) pada umumnya. Kecemasan (*Angst*) baginya merupakan syarat utama bagi manusia untuk bisa menjaga jarak dari rutinitas.

bahasa. Ada etnis yang besar dan ada yang kecil. Etnis besar di Indonesia antara lain: Jawa (42% penduduk Indonesia), Sunda, Madura, Melayu, Bali, Minangkabau, Batak, Dayak, Bugis, dan Cina. Sebagai negara yang multietnis, tidak hanya bentuk fisik melainkan juga sistem religi, hukum, arsitektur, obat-obatan, makanan, dan kesenian orang Indonesia pun berbeda-beda menurut etnisnya. Indonesia juga merupakan sebuah negara yang mempunyai tradisi religi atau agama yang cukup kuat. Ada lima agama besar di Indonesia, yakni Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha. Dalam beberapa tahun ini, setelah tahun 1998, Kong Hu Cu juga mulai kembali berpengaruh di Indonesia.

Kita semua terlempar ke dalam sebuah kepulauan nusantara yang terdiri dari ribuan pulau, dihuni ribuan etnik dengan ratusan bahasa, memiliki pengalaman dijajah yang panjang, berjuang untuk merdeka, mencapai kemerdekaan, hidup dalam tiga orde: orde lama, orde baru, dan orde reformasi.

Persoalannya adalah: Indonesia bukan hanya sebuah kategori ruang dan tempat melainkan lebih dari itu sebuah kategori ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan (disingkat: ipoleksosbudhankam). Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan "ipoleksosbudhankam" itulah yang menentukan ruang penjara yang dibayangkan sebagai Indonesia ini terasa sempit atau luas, pengab atau terang, dan panas atau sejuk.

3. Imaginasi Tentang Indonesia: Pengalaman Orde Lama

Cita-cita pergerakan pertama yang membayangkan Indonesia merdeka sesungguhnya muncul dari elemen kesukuan (Jawa), seperti terlihat dalam polemik panas antara Dr. Tjipto Mangunkusumo dan Soetatmo Soerjokoesoemo (lihat Sudiarja, 2005: 2). Dalam polemik itu dipersoalkan apakah negara baru yang muncul itu Jawa atau bukan. Bayangan tentang 'negara Jawa' ini rupanya tidak berlanjut karena sampai sekarang tidak ada satu partai pun yang mengusung simbol kejawaan.

Elemen keagamaan (Islam) pun mewarnai perjalanan sejarah pergerakan bangsa Indonesia. Elemen itu dirintis oleh berdirinya partai-partai Islam, diawali dengan Sarikat Dagang Islam yang kemudian menjadi Serikat Islam (1912).⁵ Pergerakan elemen ini memasuki wilayah politik dengan munculnya polemik tentang dasar negara Indonesia yang didirikan. Usulan Piagam Jakarta merupakan topik panas dalam menentukan dasar negara (Sudiarja, 2005: 2).⁶ Dalam konteks pergerakan, imaginasi tentang sebuah 'negara Islam' tetap hidup. Sekalipun secara yuridis formal polemik itu diatasi ketika Pancasila lebih diterima ketimbang Piagam Jakarta, elemen Islam sebagai kekuatan politis yang besar tetap membayang dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dalam sejarah, kita mengenal pemberontakan bernuansa agama (Islam) seperti

⁵ Pada awalnya motivasi gerakan elemen agama (Islam) ini lebih menonjol aspek ekonominya, yaitu untuk menyaingi kekuatan dagang Tionghoa.

⁶ Darul Islam atau "Rumah Islam" adalah gerakan politik yang diproklamasikan pada 7 Agustus 1949 (ditulis sebagai 12 Syawal 1368) oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo di Desa Cisampah, Kecamatan Ciawiligar, Tasikmalaya, Jawa Barat. Gerakan ini bertujuan mendirikan Republik Indonesia sebagai Negara Islam Dalam proklamasinya disebutkan bahwa "Hukum yang berlaku dalam Negara Islam Indonesia (NII) adalah Hukum Islam", lebih jelas lagi dalam undang-undangnya dinyatakan bahwa "Negara berdasarkan Islam" dan "Hukum yang tertinggi adalah Al Quran dan Hadits". Proklamasi NII dengan tegas menyatakan kewajiban negara untuk membuat undang-undang yang berlandaskan syari'at Islam dan penolakan yang keras terhadap ideologi selain Alqur'an dan Hadits Shahih, yang mereka sebut dengan "hukum kafir", sesuai dalam Qur'aan Surah 5. Dalam perkembangannya, DI menyebar hingga di beberapa wilayah, terutama Aceh (Gerakan DI/TII Daud Beureueh), Kalimantan Selatan (Gerakan DI/TII Ibnu Hadjar), Jawa Tengah Gerakan DI/TII Amir Fatah), dan Sulawesi Selatan (Gerakan DI/TII Kahar Muzakkar). (lihat Wikipedia http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_Islam_Indonesia).

Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang diproklamasikan di Jawa Barat dan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatra Barat.

Di kalangan cendekiawan, muncul polemik yang sangat tajam tentang ideologi politik kebudayaan Indonesia. Perjuangan ideologi di Indonesia berlangsung sama tuanya dengan revolusi atau bahkan dengan pergerakan kebangsaan (Teeuw, 1989: 30). Pertarungan ideologis antara para cendekiawan mengenai kebudayaan Indonesia sebenarnya sudah tumbuh subur sebelum kemerdekaan diraih bangsa ini. Pada tahun 1935 Sutan Takdir Alisjahbana (STA) pada periode *Pujangga Baru* memicu lahirnya polemik kebudayaan dan membangun *the culture of critical speech* (Dhakidae, 2003: 149-168). STA menganggap pandangan neokonservatisme tidak sesuai dengan kebutuhan bagi Indonesia Raya.⁷ Polemik yang dipicu oleh STA itu mempersoalkan apa yang disebut sebagai Indonesia oleh tokoh-tokoh nasionalis. Beberapa pertanyaan mendasar yang mengemuka dalam Polemik Kebudayaan antara lain: apakah Indonesia Raya merupakan penerusan pra-Indonesia? Apakah modernisasi Indonesia sinonim dengan westernisasi? Jika demikian, bagaimana hubungannya dengan perjuangan melawan kolonialisme? Pandangan STA ini dinilai dikotomis: mengunggulkan kebudayaan Barat dan merendahkan kebudayaan Timur.⁸ Di sini ada semacam perang *territorial positioning*. Barat dimaknai sebagai rasionalitas dan Timur kekurangan materialisme. Polemik ini, lebih dimenangkan oleh kubu Dr. Sutomo, Tjindabumi, Adinegoro, Dr. M. Amir, dan Ki Hajar Dewantoro.

Polemik Kebudayaan jilid II muncul kembali di tahun 1950 dengan diadakannya konferensi tentang Kebudayaan Nasional bertema “Kebudayaan Nasional dan Pengaruh Asing” itu dilaksanakan di tengah pertarungan fisik dan diplomatik melawan Belanda di Magelang tahun 1948. Konferensi itu menjadi forum bagi kaum nasionalis memberikan reaksinya terhadap “Kesepakatan Budaya” antara Indonesia dan Belanda yang merupakan bagian dari Konferensi Pertemuan Meja Bundar (KMB) yang membahas tentang kedaulatan Indonesia di Den Haag 23 Agustus – 2 November 1949.⁹ Salah satu sasaran pokok Kesepakatan Budaya itu adalah mengamankan keberlanjutan dan keberadaan budaya Belanda di dalam negara Indonesia baru. Hal inilah yang kemudian mendapat reaksi dari kaum nasionalis dalam Konferensi bulan Agustus 1950 di Jakarta. Dalam konferensi itu, ditampilkan tiga pemakalah, yakni STA, Ki Hadjar Dewantoro, dan Trisno Sumarjo.

STA berpandangan bahwa kesepakatan budaya di Den Haag memiliki keuntungan praktis bagi Indonesia, dapat dipergunakan sebagai sebuah mata rantai yang menghubungkan Indonesia dengan dunia internasional dan dengan dunia ilmu pengetahuan. Bagi STA, “di dalam kebudayaan tidak ada permusuhan, yang ada hanyalah pengembangan kemanusiaan”. Ki Hadjar Dewantara justru menilai Kesepakatan Budaya merupakan bukti kegagalan diplomasi dari

⁷ Polemik itu berlangsung di antara dua kubu, yaitu kubu STA, Sanusi Pane, Dr. Purbatjaraka dan kubu Dr. Sutomo, Tjindabumi, Adinegoro, Dr. M. Amir, dan Ki Hajar Dewantoro. Uraian yang lebih rinci mengenai politik ini lihat buku *Polemik Kebudayaan, Pokok Pikiran St. Takdir Alisjahbana, Sanusi Pane, Dr. Purbatjaraka dan kubu Dr. Sutomo, Tjindabumi, Adinegoro, Dr. M. Amir, dan Ki Hajar Dewantoro*. Kata Pengantar Achdiat K. Mihardja, Balai Pustaka, Jakarta, 1950.

⁸ STA adalah tokoh yang berpandangan bahwa Indonesia modern bukanlah kelanjutan dari pra-Indonesia dengan ikatan-ikatan lamanya yang feodalistik dan mistis. Jika ingin maju, Indonesia harus berguru pada bangsa Barat (Dhakidae, 2003: 152). Di kubu yang lain, Ki Hadjar Dewantara menganut pandangan yang lebih sinkretis tentang definisi modernitas dan konsep kebudayaan Indonesia modern. Bagi dia, warisan budaya asli penting artinya bagi kemajuan sosial dan kemanusiaan (Foulcher, 1986: 14-15).

⁹ Uraian tentang isi kesepakatan budaya antara Indonesia dan Belanda dari Pertemuan Meja Bundar itu lihat Foulcher, 1986: 15-17.

delegasi Indonesia di Den Haag. Ki Hadjar mempertanyakan manfaat Belanda dalam hubungan dengan dunia Internasional. Bagi dia, sekarang waktunya Indonesia lebih mandiri dan menjalin hubungan justru dengan sesama bangsa Asia seperti India dalam mencari perumusan tentang modernitas. Posisi Trisno Sumardjo lebih mendukung Ki Hadjar Dewantara. Dia menilai, Kesepakatan Meja Bundar, *Marshall Plan*, dan PBB menggiring Indonesia menuju kapitalisme dan pengaruh Amerika. Pengaruh-pengaruh itu akan membawa serta elemen-elemen imperialisme, bertentangan dengan gagasan tentang kemerdekaan kita, humanitarianisme, dan visi kerakyatan kita. Pada tanggal 18 Februari 1950, sekelompok seniman muda mengumumkan sebuah “Surat Kepercayaan Gelanggang”¹⁰ sebagai sebuah penegasan sikap mereka atas orientasi kebudayaan mereka yang memperkuat dan mengembangkan pendapat STA sebelumnya.

Sejak diberlakukannya UUDS tahun 1950, Indonesia memasuki sistem demokrasi yang disebut Demokrasi Liberal. Selama periode sembilan tahun demokrasi liberal (1950 – 1959) terjadi pergantian kabinet yang terus-menerus sebanyak 7 kali.¹¹

Di bidang politik, Indonesia yang baru berusia 20 tahun menjalani masa yang disebut masa percobaan demokrasi (demokrasi liberal, 1950-1957) yang penuh konflik. Tahun 1956, Presiden Soekarno memutuskan untuk menjalankan ‘demokrasi terpimpin’ 1957-1965 (Ricklefs, 2005: 471-507). Soekarno memandang bahwa sistem demokrasi parlementer dibangun di atas konflik inheren dan tidak sesuai dengan nilai-nilai keharmonisan bangsa Indonesia yang mengutamakan hubungan kemanusiaan. Soekarno mengusulkan sebuah ikatan kerjasama yang baik antara tiga kekuatan, yaitu kelompok nasionalisme, kelompok agama, dan kelompok komunis, yang disebutnya dengan istilah pemerintahan Nasakom. Tujuan utamanya adalah menciptakan ketenangan antara ketiga kekuatan politik di Indonesia, yaitu kelompok tentara, kelompok Islam, dan kaum komunis. Dengan konsep Nasakom, pada bulan Februari 1956 Soekarno mengumumkan ‘Demokrasi Terpimpin’ dan mengusulkan pembentukan kabinet yang melibatkan komunis.

Dalam sebuah pertemuan tanggal 21 Februari 1957 di Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengajukan apa yang dia sebut sebagai “Konsepsi Presiden” yang pada pokoknya berisi pandangan bahwa (1) sistem demokrasi parlementer secara Barat tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia, oleh karena itu harus diganti dengan Demokrasi Terpimpin; (2) untuk pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, perlu dibentuk suatu kabinet gotong royong yang anggota terdiri dari semua partai dan organisasi berdasarkan pertimbangan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Konsepsi Presiden ini menengahkan pula perlunya pembentukan Kabinet Kaki Empat yang berisi keempat partai besar, yakni PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia (lihat Anwar, 2010).

Dipicu oleh kegagalan konstituante¹² dalam menetapkan undang-undang dasar yang baru, sementara UUDS 1950 yang memberlakukan demokrasi liberal dipandang gagal, maka pada

¹⁰ Seniman-seniman muda itu adalah Chairil Anwar, Asrul Sani, Rivai Apin, M. Balfas, M. Akbar Djuhana, Mochtar Apin, Henk Ngantung, dan Baharudin.

¹¹ Perlu dicatat bahwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh kolonial Belanda baru dilakukan tanggal 27 Desember 1949. Sejak saat itulah, diberlakukan sistem demokrasi yang dikenal dengan sistem demokrasi liberal. Kabinet-kabinet itu adalah Kabinet Natsir (6 September 1950 - 21 Maret 1951), Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 3 April 1952), Kabinet Mr. Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953), Kabinet Mr. Ali Sastroamidjojo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955), Kabinet Baharuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956), Kabinet Mr. Ali Sastroamidjojo II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957), Kabinet Juanda (9 April 1957- 5 Juli 1959) (lihat Setneg RI, 1994: 25-29).

¹² Badan Konstituante adalah sebuah badan resmi hasil pemilihan umum tahun 1955. Badan ini bertugas menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950. Badan ini mulai bersidang pada tanggal 10 November 1956 namun sampai dengan tahun 1958 belum berhasil merumuskan UUD yang diharapkan. Oleh karena di kalangan

tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengumumkan Dekrit Presiden.¹³ Sejak diumumkannya dekrit presiden 5 Juli 1959, dimulailah era baru demokrasi, yang disebut Demokrasi Terpimpin. Sistem demokrasi liberal dipandang tidak sesuai dengan nilai-nilai sistem demokrasi di Indonesia. Pergantian kabinet yang terus-menerus menyebabkan stabilitas pemerintahan menjadi sangat terganggu dan kehidupan sosial menjadi tidak menentu. Pada tanggal 17 Agustus 1959, Soekarno mengumumkan sebuah sikap politik yang kemudian disebut sebagai Manifesto Politik (Manipol)¹⁴ yang menyerukan dibangkitkannya kembali semangat revolusi, keadilan sosial, dan perlengkapan kembali lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi negara (Ricklefs, 2001: 527). Pada awal tahun 1960, Manipol ini dijabarkan ke dalam konsep yang lebih jelas, yang disingkat menjadi USDEK, yang berarti Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi terpimpin, Ekonomi terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Manipol-USDEK menjadi definisi resmi dari ortodoksi ideologi.

Manipol-USDEK kemudian diperkenalkan ke semua sektor, pendidikan, pemerintahan, dan pers. Pers yang tidak mendukung Manipol-USDEK, seperti pers yang pro-Masyumi dan pro-PSI dilarang terbit. Dalam kurun waktu tiga tahun saja (1959-1961) oplag surat kabar menurun drastis sekitar sepertiganya, dari 1.039.000 eksemplar untuk 90 surat kabar menjadi 710.000 eksemplar untuk 65 surat kabar.

Konsep Nasakom dan Demokrasi Terpimpin yang oleh Soekarno diharapkan akan mampu menyatukan kekuatan-kekuatan politik bangsa Indonesia dalam sebuah kesatuan yang serasi tidak membawa hasil sebagaimana yang diinginkannya. Hal itu bahkan telah membuat masyarakat hidup dalam kotak-kotak saling curiga dan membuat persaingan yang tidak sehat. Sikap otoritarianisme yang ditunjukkan Presiden Soekarno adalah ketika dia mengakhiri dengan tragis sistem Demokrasi Liberal dengan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Perbedaan dan pertentangan pendapat yang sangat tajam dan dinamis antara kelompok Pascasila, Islam, dan sosial-ekonomi merupakan indikasi bentuk demokrasi yang sangat tinggi (Sudiardja, 2005: 3).

4. Sosok Leviathan Negara Orde Baru

Salah satu konsekuensi penting dari munculnya Soeharto adalah semakin menguatnya militer dalam kehidupan masyarakat. Di bawah pemerintahan Orde Baru, fungsi utama ABRI adalah menjadi kekuatan keamanan internal (*internal security*). Seorang pengamat militer mengatakan, Indonesia selama periode Orde Baru di bawah Presiden Soeharto menekankan dan melembagakan tiga pola pengawasan terhadap masyarakat, yaitu: militerisasi, pengawasan politik domestik secara komprehensif, dan sesekali tetapi terus-menerus melakukan teror negara (Tanter, 1990). Elemen komunis dalam konsep ‘Nasionalisme, Agama, dan Komunisme’ (Nasakom) pemerintahan Soekarno tak punya hak hidup lagi, baik ideologi maupun para penganut ideologi beserta keluarganya dengan sistem tumpas kelor.

masyarakat semakin menguat pendapat umum untuk kembali ke UUD '45. Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang berisi: 1) kembali ke UUD 1945, dan 2) Bubarkan Konstituante.

¹³ Isi Dekrit Presiden adalah (1) pembubaran konstituante, (2) tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945, dan (3) pembentukan MPRS dan DPAS.

¹⁴ Manipol yang kemudian dijadikan semacam GBHN, berasal dari Pidato Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1959 berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” yang membenarkan Indonesia kembali ke UUD 1945. Pidato itu dapat dilihat dalam <http://www.scribd.com/doc/16510185/Penemuan-Kembali-Revolusi-Kita>. Tiga bulan setelah pidato itu, Soekarno menyatakan bahwa naskah pidato itu merupakan “manifesto politik Republik Indonesia” (Manipol). Soekarno mengatakan bahwa revolusi Indonesia memiliki lima gagasan penting, yaitu: Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi terpimpin, Ekonomi terpimpin, dan Kepribadian Indonesia (disingkat USDEK). (Lihat, Museum Polri, 2010).

Militer dalam pemerintahan Orde Baru adalah aparat negara represif yang dapat mempergunakan cara-cara kekerasan yang cenderung berlebihan dan tidak memperhitungkan aspek kemanusiaan. Budaya kekerasan pun diterima dan bahkan didogmakan sebagai jalan keluar yang terbaik untuk menyelesaikan semua persoalan. Negara dengan aparatus militernya itu memaksa *civil society* untuk mempunyai penghormatan serta perasaan takut dan segan dengan menerapkan metode kekerasan yang melahirkan ketakutan yang mencekam. Militer sengaja menciptakan secara sistematis pandangan bahwa negara haruslah ditakuti, tidak hanya sekadar disegani atau dihormati. Inilah keberhasilan rezim Orde Baru yang selama ini menonjolkan wataknya sebagai negara yang tidak memerlukan legitimasi moral. Negara dengan semangat dan watak yang seperti itu menerapkan paradigma kekuasaan yang oleh Hobbes disebut Leviathan (lihat Magnis-Suseno, 1993: 1-13). Kesuksesan rezim Orde Baru sebagai perwujudan dari negara yang bernetamorfosis sebagai Leviathan ini ditunjukkan oleh kemampuannya dalam mengatur ketakutan masyarakat sehingga tunduk pada negara secara mekanis sebagaimana jarum arloji yang berputar secara otomatis.

Tahun 1978 marak terjadi aksi mahasiswa menentang pencalonan kembali Soeharto sebagai presiden. Tujuh surat kabar yang menyiarkan aksi mahasiswa itu dibekukan penerbitannya hanya melalui telepon yang dilakukan oleh Laksusda Jaya. Ketujuh surat kabar itu adalah: *Kompas*, *Sinar Harapan*, *Merdeka*, *Pelita*, *The Indonesian Times*, *Sinar Pagi*, dan *Pos Sore*. Setelah ketujuh pemilik koran tersebut meminta maaf kepada Soeharto, barulah diijinkan untuk terbit kembali (Luwarso, 2010). Setelah Peristiwa Malari (1974), sebanyak 12 penerbitan pers dibredel melalui pencabutan Surat Ijin Terbit (SIT).¹⁵ Termasuk dalam ke-12 penerbitan yang dibredel itu adalah Harian KAMI dan Mingguan Mahasiswa Indonesia yang pernah menjadi pendukung utama berkuasanya Soeharto. Pencabutan SIT dipertegas lagi dengan pencabutan Surat Ijin Cetak (SIC) yang dikeluarkan oleh Laksus Kopkamtib Jaya (Haryanto, 1996). Pemerintah memiliki argumen dalam memberangus pers.

Leviathan adalah sebuah metafora yang digunakan Thomas Hobbes untuk melukiskan negara modern (khususnya *nation state*) yang dibangun oleh sistem kekuatan yang terkonsentrasi di pusat dan di bawah otoritas sebuah kekuasaan. Hobbes mengumpamakannya sebagai Leviathan, monster laut yang tidak bisa dihalang-halangi (Piliang, 2003: 41). Gambaran Hobbes mengenai model Negara Leviathan ini sesuai dengan gambaran kosmologi Newton. Ia melihat kosmos sebagai sebuah sistem yang stabil, yang keberaturannya (*order*) dijaga oleh kekuasaan pusat yang bersifat universal dan tak berubah. Pandangan kosmologis Newton ini mengharuskan adanya kekuasaan yang terpusat, struktur sosial yang teratur, dan institusi yang stabil di dalam sistem sosial. Leviathan itu bernama Orde Baru.

5. Leviathan Moral dalam Orde Reformasi

Setelah rezim otoriter Orde Baru dengan sosok Leviathannya berakhir, ikatan sosial dan toleransi semu yang dibangunnya pun berakhir. Keadaan tidak bertambah baik. Leviathan Orde Baru telah membuahkan anak kandungnya: Leviathan Moral Orde Reformasi. Benih-benih perbedaan dan konflik sosial yang ditekan selama pemerintahan militeristik sebagai SARA

¹⁵ Penerbitan pers yang ditutup adalah: *Indonesia Raya*, *Pedoman*, *Abadi*, *Harian KAMI*, *Nusantara*, *Jakarta Times*, *Mingguan Wenang*, *Pemuda Indonesia*, *Majalah Ekspres* (Jakarta), *Suluh Berita* (Surabaya), *Mingguan Mahasiswa Indonesia* (Bandung), dan *Indonesia Pos* (Ujung Pandang). Lihat Ignatius Haryanto (1996) *Pembredelan Pers di Indonesia: Kasus Koran Indonesia Raya*, Jakarta: LSPP (Lembaga Studi Pers dan Pembangunan).

bangkit seperti monster yang siap mencari mangsa dalam rumah bersama Indonesia. Monster itu pun kini menggerogoti manusianya dan memasuki kesadaran kolektifnya.

Dalam uraiannya berjudul "*Censorship in Post Suharto Indonesia: From a Military Dictatorship to Dictatorship of the Moral*," Katerina Valdivia Bruch (2012) memaparkan berbagai bukti tentang kediktatorial moral kelompok intoleran terhadap keragaman ekspresi budaya Indonesia. Beberapa di antaranya sebagai berikut. (1) Kriminalisasi terhadap 64 anak punk di Aceh dalam sebuah konser. Mereka ditangkap polisi syariah, digunduli, dibina tentang ajaran dan moral Islam, dan diberi pakaian Muslim; (2) Pelarangan dan penghancuran patung Bima dan Gatotkaca di Purwakarta (2010), di Pekanbaru (2010); (3) Pelarangan patung *Tiga Mojang* karya Nyoman Nuarta di Bekasi (Juli 2010); (4) Pelarangan pameran lukisan Sigit Pius Kuncoro oleh Gerakan Pemuda Kabah (GPK) Desember 2000 di FKK Yogyakarta karena ada sebuah lukisan telanjang; (5) Pelarangan karya instalasi Agus Suwage dan Davy Linggar dalam acara HUT Bank Indonesia di Jakarta (2005) oleh sekitar 200 orang anggota FPI karena terdapat gambar telanjang Adam dan Hawa; (6) Pelarangan pameran seni patung, lukisan, dan karya instalasi Dadang Christanto (2002) di Solo bertajuk "*The Unspeakable Horror*" karena mengangkat tema pembantaian PKI di Indonesia; (7) UU Antopornografi dan Antipornoaksi (2008) yang mengatur sensor terhadap media massa, penyiaran, dan film.

Perkembangan terbaru soal *moral dictatorship* terjadi Aceh yang memanfaatkan keistimewaan daerahnya. Sebuah pelarangan yang 'tidak masuk akal' adalah larangan perempuan yang membonceng sepeda motor 'duduk mengangkang' (maksudnya duduk menghadap ke depan) yang dihubungkan dengan upaya menegakkan syariat, nilai budaya, dan adat masyarakat Aceh.¹⁶ Sekalipun diprotes dengan keras, Perda Syariah itu tetap diberlakukan.

Yang paling mutakhir adalah rencana larangan perempuan dewasa di Aceh Utara menunjukkan kebolehnya menari di depan publik. Perempuan menari di depan publik dianggap bertentangan dengan penerapan syariat Islam. Wacana pembuatan peraturan yang melarang perempuan menari itu diungkapkan Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib. Menurut dia, perempuan berlenggak-lenggok di hadapan laki-laki bertentangan dengan hukum syariah.¹⁷

Pengaturan, pelarangan, dan penghancuran kegiatan berekspresi tersebut pada umumnya berlangsung dengan aman tanpa ada pembelaan dan perlindungan dari pihak pemerintah dan kepolisian, terutama karena pelaku aksi tersebut mengenakan atribut Muslim. "*While they use the muslim clothes, they feel protected as they think that police cannot beat muslims, because they would 'beat' (be against) religion as well*" (Bruch, 2012).

Keberagaman bangsa ini juga mulai dimonolitikkan. Monster penyeragaman wawasan, seperti yang terjadi pada penyeragaman ideologi 'Pancasila' versi Orde Baru, terjadi melalui basis moralitas dan agama di atas kepentingan sebagai satu bangsa. Hal ini jelas mempersempit ruang untuk menghayati kebersamaan lintas kelompok (Budianta, 2012: 265).

Penelitian yang dilakukan sejumlah LSM menunjukkan bahwa sekarang semakin banyak ruang publik yang diwarnai dengan identitas kelompok-kelompok eksklusif (Budianta, 2011: 264). Di kota-kota besar bermunculan perumahan mewah yang menjual dan mempromosikan

¹⁶ Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariah (JMSPS) melalui juru bicaranya Affan Ramli menilai menilai hal tersebut sebagai pembodohan publik dan meniru Taliban Pakistan. Berdasarkan kajian JMSPS, tidak ada satu pun hukum syariah atau fikih sepanjang perkembangan studi pengetahuan Islam yang berbicara tentang larangan duduk mengangkang bagi perempuan dalam berkendara. "Demikian juga tidak ada satu pun adat Aceh, baik adat istiadat maupun hukum adat, yang melarang perempuan duduk mengangkang di kendaraan," kata Affan Ramli, juru bicara JMSPS, Ahad, 13 Januari 2013 (lihat Warsidi, 2013)

¹⁷ Lihat berita VivaNews, "Aceh Utara Akan Larang Perempuan Menari di Depan Publik: Kalau masih anak-anak tidak masalah, mereka belum akil baliq" (25 Mei 2013). <http://nasional.news.viva.co.id/>.

pembedaan sosial dan eksklusivitas gaya hidup secara terang-terangan. Di samping itu, bermunculan pula perumahan-perumahan dengan identitas keagamaan, seperti perumahan Islami. Di Yogyakarta dan kota-kota lainnya, muncul pula fenomena rumah-rumah kost yang menerima mahasiswa dari kelompok tertentu saja. Hal itu pun dituangkan secara jelas dalam brosur atau pun papan pengumuman di depan rumah. Liliwati Kurnia (Budianta, 2011: 264) menunjukkan gejala masyarakat perkotaan modern di abad ke-21 ini melakukan segregasi sosial melalui penelitian di Pasar Baru. Di Pasar Baru, segerasi ruang dilakukan berdasarkan identitas kelompok. Hal ini, menurutnya, sangat rentan dan menjadi sasaran dalam konflik komunal daripada ruang yang memungkinkan interaksi lintas batas. Bandingkan fenomena ini dengan fenomena masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang melakukan kontrol atas populasi penduduk Hindia Belanda dengan cara menciptakan perkampungan berdasarkan kelompok etnis dan rasial (Alkatiri, Rizal, dan Sohib, 2011).

Dalam perspektif Heideggerian, fenomena eksklusivitas yang berlebihan itu termasuk modus kehidupan yang tidak otentik (*Das Man*). Orang-orang ini melihat keragaman sebagai ancaman sehingga mereka menutup diri dan menjadi asing terhadap kelompok di luar dirinya. Mereka pun membangun sebuah rezim ketakutan (*regime of fear*) yang terbukti menjadi sponsor bagi banyak tindakan kekerasan sepanjang sejarah (lihat Colombijn, 2001). Henk Schulte Nordholt yang menelusuri "*genealogy of violence*" sejak zaman kolonial, bahkan juga sebelum periode kolonial menunjukkan bahwa konflik-konflik kedaerahan, agama, etnik, dan sosial di Indonesia telah memiliki akar historis yang panjang dan mendalam. Nordholt menggambarkan negara kolonial sebagai sebuah regim ketakutan (*regime of fear*) yang melakukan banyak tindak kekerasan, termasuk penghilangan para kriminal kecil (*lynching of petty criminals*). William Frederick menunjukkan kekerasan yang terjadi selama revolusi (1945-1949) yang secara sadar dieksploitasi oleh militer dan pemimpin-pemimpin politik kita. Sulistyono (2000) membuktikannya melalui bukunya yang terkenal *Palu Arit di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan* (Jakarta: Gramedia, 2000). Geoffrey Robinson menunjukkan hal yang sama di Bali. Dalam berbagai kasus itu selalu tampak apa yang oleh William H. Frederick disebut sebagai "*shadows of an unseen hand*" (bayangan-bayangan tangan yang tak kelihatan). Regim ketakutan itu juga tampak selama pemerintahan Orde Baru. Regim ini tidak saja menghancurkan ideologi tertentu tetapi juga memerangi setiap orang yang menganut ideologi yang berbeda. Mereka juga melaksanakan operasi *lynching of petty criminal's* yang dikenal sebagai penembakan misterius.

Akibat fatal yang jelas menyongsong di depan mata adalah: semua tindakan kekerasan itu dipandang sebagai sarana yang sah (*legitimate means*) untuk menyelesaikan masalah. Orang-orang yang 'bermasalah' itu secara sosiologis dikonstruksi sebagai *outsiders*, dan diberi berbagai stigma seperti ajaran sesat, pengkhianat bangsa, pengkhianat Pancasila, mata-mata musuh, manikebuis, anti-revolusi, atheis, gabungan anak liar, gerakan pengacau keamanan, penjual kehormatan bangsa, dan lain-lain. Mereka secara sah boleh 'dihabisi' oleh negara dan kelompok masyarakat '*insiders*.' Bagi kita, kekerasan sah dilakukan kepada kelompok di luar kita. Kelompok di luar ini kita pandang bukan sebagai makhluk manusia yang dilindungi hukum. Hukum tidak berlaku bagi mereka. Jika ini yang terjadi, dan terjadi secara terus-menerus, maka bangsa ini cepat atau lambat akan melemah.

6. Penutup: Membuka Ruang Multikultural

Indonesia memiliki sejarah panjang yang buruk dalam hal kemampuan pengelola perbedaan dan kemajemukan bangsa. Penyelesaian tragis dengan berbagai cara kekerasan, seperti yang dipertontonkan dengan pembunuhan massal terhadap orang-orang kiri Indonesia,

pembredelan media massa, penangkapan, pemenjaraan, dan penghilangan para aktivis, serta penembakan misterius yang dipraktikkan negara Orde Baru dilanjutkan dalam Era Reformasi ini oleh kelompok-kelompok intoleran yang dibiarkan oleh negara. Model penyelesaian ini tidak mendidik bangsa Indonesia untuk membangun *konsensus demokratis* yang mengutamakan *kerjasama dan kompromi*. Hal ini merupakan syarat mutlak bagi tumbuhnya masyarakat sipil Indonesia. Kita semua sepakat untuk membangun rumah Indonesia ini sebagai sebuah ruang bersama, sebuah masyarakat sipil yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Hal ini tentu tidak mudah. Para pemimpin sipil pun berpola pikir sangat militeristik.¹⁸

Bagaimana membangun modus kehidupan yang otentik dalam masyarakat manusia Indonesia yang terlanjur terpenjara dalam sebuah rumah multikultur? Memandang gejala multikultur sebagai fenomena yang menakutkan dan mengancam kelompok sendiri merupakan sebuah kemunduran (*set back*). Di masa lampau, sekolah-sekolah negeri maupun swasta menjadi ruang multikultural karena siswa belajar tentang keragaman secara langsung dari interaksi sosial dengan siswa dari latar belakang suku, agama, ras, dan golongan yang berbeda-beda. Dulu siswa bisa mendapat pelajaran ‘agama lain’ daripada agama yang dianutnya tanpa *phobia* dan tanpa takut bahwa imannya sendiri akan luntur.¹⁹ Zeffry Alkatiri (Budianta, 2011: 264-266) memimpikan kembalinya ruang multikultural di dunia pendidikan, mulai dari tingkat dasar sampai menengah atas. Fakta yang terjadi saat ini adalah ruang-ruang multikultural digantikan dengan sekolah-sekolah dengan basis agama (bahkan di sekolah negeri pun). Tanpa ruang-ruang publik yang memungkinkan terjadinya dialog dan komunikasi lintas budaya, paradigma “kawan-lawan” (karena anak dimasukkan dalam kotak yang sama) tak pernah akan berubah menjadi “kawan-kawan” (karena hanya dalam perjumpaanlah persahabatan dan keakraban dibentuk).

Dari sudut pandang politik media, representasi Indonesia tampak sangat pincang. Tanpa sebuah studi yang cermat pun, kita mudah menyimpulkan bahwa program-program televisi, terutama sinetron, hanya mengungkap kehidupan golongan menengah ke atas beserta gaya hidupnya, suku tertentu (Jawa dan Betawi), dan agama (Islam). Studi akademis yang dilakukan Ouda Teda Ena (2013) berjudul pun mengungkapkan bahwa *English E-textbooks* selama ini dibuat tidak dilandasi dengan *sense of diversity*. Secara dominan, gambaran visual yang ditampilkan buku-buku tersebut hanya terfokus pada (suku) Jawa, (agama) Islam, dan (gender) laki-laki. Indonesia sebagai sebuah rumah bersama dengan kekhasan multikultural belum dihayati dengan baik oleh para pemangku kepentingan.

Dunia mengakui, budaya toleransi (*culture of tolerance*) di Indonesia sedang tergerus ideologi kaum radikal. Pemerintah tak berdaya menghadapi radikalisme itu. Karena itu, ketika Appeal of Conscience Foundation (ACF) dari AS berencana memberikan penghargaan negarawan penjaga toleransi (World Statesman Award) kepada Presiden SBY sebagai tokoh toleransi, semua orang mempertanyakan (baca: menentang) hal itu (lihat tulisan Supriatma (2013)).

Michel Foucault dalam *Power and Sex* menegaskan perlunya kaum intelektual mengingat kembali peran profetiknya, tentu untuk melawan berbagai irasionalitas dalam masyarakat dan

¹⁸ Perhatikan pernyataan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dalam berita “Gubernur Jabar: Ahmadiyah Hilang, Masalah Pun Hilang” (lihat Perdana, 2013) menunjukkan ketidakcakapan mengelola perbedaan. Pola pikir ini setali tiga uang dengan Soeharto: PKI hilang, Indonesia damai.

¹⁹ Saya masih ingat dengan jelas sebuah spanduk yang dipasang di sebuah tempat di wilayah Yogyakarta yang berisi: “Belajar di sekolah kafir, ewes-ewes-ewes, bablas imane!” Spanduk semacam ini muncul dari rasa takut atau rasa terancam yang berlebihan. Pernyataan Dewi Fortuna Anwar yang dikutip Bruch (2012) kiranya tepat untuk situasi seperti ini. “*In Indonesia we have a majority with minority complex. They believe that Islam is being undermined by a more liberal environment that has allowed greater freedom of expression, including for minorities.*”

modus kehidupan yang tidak otentik. Martin Luther King mengungkapkan hal yang hampir sama, “*We will have to repent in this generation not merely for the hateful words and actions of the bad people but for the appalling silence of the good people.*” Barangsiapa yang secara pasif (diam-diam) membiarkan kejahatan (terjadi), maka hal itu sama artinya dengan terlibat di dalamnya. Barangsiapa yang tidak melakukan protes terhadap kejahatan yang terjadi, maka sejatinya ia telah bekerjasama dengan kejahatan itu.

Dalam kaitan dengan peran negara (baca: presiden) yang membiarkan berbagai tindakan intoleransi kelompok-kelompok radikal di Indonesia, muncul secara sangat meyakinkan Prof. Dr. Frans Magnis Suseno seorang intelektual dengan fungsi profetiknya untuk melawan irasionalitas yang dihadapinya. Dia menulis surat protes yang sangat tegas kepada direktur ACF untuk membatalkan pemberian hadiah bergengsi kenegarawanan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kata Romo Magnis dalam surat itu, “*This is a shame, a shame for you. It discredits any claim you might make as an institution with moral intentions.*” Sebuah pelaksanaan fungsi profetik yang patut diteladani oleh kaum intelektual Indonesia untuk meretas irasionalitas kehidupan bangsa dan mewujudkan modus kehidupan yang otentik.²⁰

Daftar Pustaka

- Anderson, Benedict, 1991. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, Verson, 1991.
- Anwar, Rildo Ananda, 2010. *Soekarno-Hatta dari Dwitunggal ke Dwitanggal: Telaah Atas Peran Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI Pertama*. Diunduh 5/11/2010 dari <http://www.setneg.go.id/index.php?option=com>
- Budianta, Melani, 2011. “Merajut Ingatan Indonesia: Sebuah Refleksi” dalam *Ilmu Pengetahuan Budaya dan Tanggungjawabnya*. Riris K. Toha-Sarumpaet (Editor). Jakarta: UI Press.
- Bruch, Katerina Valdivia, 2012. “Censorship in Post Suharto Indonesia: From a Military Dictatorship to Dictatorship of the Morals?” *Paper Presented at Public Discussion : Censorship in the visual arts in Indonesia after 1998: paradoxes of a practice in a changing media landscape*, Yogyakarta: Langgeng Art Foundation, 17 Februari 2012.
- Colombijn, Freek dan J. Thomas (eds.), 2002. *Roots of Violence in Indonesia: Contemporary Violence in istorical Perspective*. Leiden: KITLV Press.
- Dhakidae, Daniel, 2003. *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ena, Ouda Tena, 2013. *Visual Analysis of E-Textbook for Senior High School In Indonesia*. Charlestone: Sounth Carolina.
- Gatra, Sandro, 2013. “Kemenham: Pembunuhan di LP Cebongan Tak Langgar HAM” dalam *Kompas*, 11 April 2013.
- Hardiman, F. Budi. 2008. *Heidegger dan Mistik Keseharian: Suatu Pengantar Menuju Sein und*

²⁰ Sayang sekali, ketika terjadi pembantaian tahanan negara di dalam Lapas Cebongan oleh oknum-oknum Kopassus, kaum intelektual bungkam. Yang mengeritik dan melakukan perlawanan keras hanyalah Komnas HAM dan segelintir anggota DPR, sementara banyak pejabat negara memuji tindakan oknum-oknum tersebut sebagai tindakan “ksatria.” Sesuatu yang melecehkan akal sehat. Yang paling melecehkan akal sehat adalah komentar Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, bahwa Pembunuhan di dalam LP Cebongan Tak Langgar HAM (lihat Gatra, 2013)

- Zeit*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Luwarso, Lukas, 2010. *Pers Indonesia, Pergulatan untuk Kebebasan*. Diunduh 10/11/2010 dari <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/2000/08/31/0006.html>
- Magnis-Suseno, Franz, 1993. *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Perdana, Putra Prima, 2013. "Gubernur Jabar: Ahmadiyah Hilang, Masalah Pun Hilang" dalam *Kompas*, Selasa, 7 Mei 2013.
- Piliang, Yasraf Amir, 2003. *Hantu-hantu Politik dan Matinya Sosial*. Solo: Tiga Serangkai.
- _____, 2006. "Antara Minimalisme dan Pluralisme: Manusia Indonesia dalam Serangan Postmodernisme" dalam *Menggeledah Hasrat: Sebuah Pendekatan Multi Perspektif*. Alfathri Aldin (Editor). Yogyakarta dan Bandung: Jalasutra.
- Ricklefs, M.C., 2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2004*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Sudiardja, Anton, 2005. *Arah Reformasi Indonesia: Sebuah Kilas Balik*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma.
- Sulistyo, Hermawan, 2000. *Palu Arit di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan (1965-1966)*. Jakarta: Gramedia bekerjasama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation.
- Supriatma, Made, 2013. "Mengapa Yudhoyono Ngotot Menerima 'World Statesman Award?'" dalam *Jurnal IndoPROGRESS*, 24 Mei 2013.
- Teeuw, A., 1984. *Sastra dan Ilmu Sastra: Pengantar Teori Sastra*. Jakarta: Pustaka Jaya – Giri Mukti Pasaka.
- Tanter, Richard, 1990. "The Totalitarian Ambition: Intelligence Organizations in the Indonesian State," in Arief Budiman, ed., *State and Civil Society in Indonesia*. Victoria, Australia: Monash Papers on Southeast Asia, no. 22, Monash University.
- Taum, Yoseph Yapi, 2006. "Membangun *Sense of Diversity* dalam Masyarakat Multietnik". Makalah dibawakan dalam Focus Group Discussion (FGD) "*Identifikasi Isu-isu Strategis yang Berkaitan dengan Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa*", dilaksanakan oleh Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, tanggal 10 Oktober 2006.
- Taum, Yoseph Yapi, 2006. "Akar Budaya Kekerasan" Artikel dalam *Warta Kampus*. No. 26/2006.
- VivaNews, 2013. "Aceh Utara Akan Larang Perempuan Menari di Depan Publik: Kalau masih anak-anak tidak masalah, mereka belum akil baliq" (25 Mei 2013). Diunduh dari <http://nasional.news.viva.co.id/>.
- Warsidi, Adi, 2013. "Larangan Duduk Mengangkang = Taliban Pakistan?" dalam *Tempo*, Minggu, 13 Januari 2013.

Yogyakarta, 25 Mei 2013